

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
SERTA KELAUTAN)**

---

Tahun Sidang : 2019-2020  
Masa Persidangan : II  
Jenis Rapat : Audiensi dengan Komisi II DPRD Kab. Jembrana Provinsi Bali  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/Tanggal : Kamis, 6 Februari 2020  
Waktu : 10.00 s.d. 11.30 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)  
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta  
Acara : Menerima Audiensi  
Ketua Rapat : Drs. I Made Urip, M.Si. (Anggota Komisi IV DPR RI/F.PDIP)  
Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo  
Hadir : Hadir Tamu:  
1. I Ketut Swastika (Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Jembrana Provinsi Bali);  
2. Nii Komang Sri Kendel (Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Jembrana Provinsi Bali);  
3. I Gede Riaog (Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Jembrana Provinsi Bali);  
4. Ni Putu Lilyana (Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Jembrana Provinsi Bali);  
5. I Gede Putu Suegardana (Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Jembrana Provinsi Bali);  
6. I Ketut Catur (Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Jembrana Provinsi Bali);  
7. Ni Wayan Urirti (Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Jembrana Provinsi Bali);  
8. I Ketut Astara Putri (Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Jembrana Provinsi Bali);  
9. H. Sajudin (Sekretaris);

10.Ir. Manuar (Bendahara);

11.Ipr. Arcop

12.I Ketut Suastika Yasi

## **I. PENDAHULUAN**

1. Drs. I Made Urip, M.Si., menerima audiensi dari Komisi II DPRD Kabupaten Jembrana Provinsi Bali membahas Mekanisme dan Tata Cara Mengakses Program Pusat di Sektor Pertanian serta Dukungan Pemerintah Pusat dalam Mengembangkan Sektor Pertanian di Kabupaten Jembrana, dibuka pukul 10.00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Selanjutnya Komisi II DPRD Kabupaten Jembrana Provinsi Bali menyampaikan permasalahan dan konsultasi terhadap Tata Cara Mengakses Program Pusat di Sektor Pertanian serta Dukungan Pemerintah Pusat dalam Mengembangkan Sektor Pertanian di Kabupaten Jembrana, antara lain:
  - a. Gapoktan telah menyerahkan proposal bantuan, tetapi setelah bantuan sampai di tingkat Kabupaten, bantuan disalurkan tidak tepat sasaran.
  - b. Koperasi Nelayan, anggaran bantuan ditarik karena sempat mangkrak.
  - c. Bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat (KKP dan Kementan) sebagian besar tidak terpakai karena tidak tepat sasaran.
  - d. Mesin yang menggunakan BBG tidak relevan dan tidak bisa dioperasikan lebih dari 10 jam sehingga minta bantuan mesin dengan menggunakan bahan bakar diesel.
  - e. Membutuhkan dukungan Pusat dalam pemanfaatan koperasi (Koperasi Nelayan dan Wamerta Sejati) yang digunakan untuk jual beli ikan.
  - f. Hasil produksi perikanan di Jembrana overload dan saat ini pendapatan dan kesejahteraan nelayan berkurang dikarenakan ada permainan Niarga.
  - g. Komoditas ikan belum memiliki harga dasar sesuai dengan komoditas pertanian.
  - h. KUD pengoperasiannya semakin menurun dan cenderung berfungsi sebagai simpan pinjam. Sudah melakukan kegiatan penyaluran beras pada ASN namun terkendala karena ada dua pabrik besar yang menyerap hasil panen. Meminta dukungan Pusat terkait dengan pembangunan UPGB atau bantuan lainnya.

### **III. KESIMPULAN**

Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti permasalahan yang disampaikan oleh Komisi IV DPRD Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur dalam Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian/Lembaga mitra Komisi IV DPR RI.

### **IV. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 11.30 WIB.

a.n. Ketua Rapat  
Sekretaris Rapat,

Ttd.

**Drs. Budi Kuntaryo**  
NIP.196301221991031001